

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pedoman dalam penelitian ini, menggunakan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Menurut Ketut dan Putu (2016) dalam penelitiannya yang membahas tentang pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. Menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, semakin baik kualitas pelayanan dan semakin ketatnya sanksi perpajakan akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Winda dan Muchamad (2012) yang melakukan penelitian tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pada penelitian yang dilakukan Siti (2013) tentang pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan

tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak memengaruhi kemauan membayar Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden belum sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara. Persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Penggunaan atau perubahan/penggantian sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan sudah memberikan hasil yang positif

Berdasarkan uraian tiga penelitian terdahulu diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan bahasan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis. Persamaan dari tiga penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu pada penelitian terdahulu menjelaskan faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang terhadap penerimaan pajak sedangkan penulis membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak.

B. Teori Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Undang - Undang nomor 28 Tahun 2017, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut beberapa ahli : Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (Resmi, 2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2016), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut N. J. Feldmann (Resmi, 2016), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi diatas dapat diartikan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib yang dimiliki orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dari apa yang mereka kerjakan yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam

undang-undang tanpa adanya imbal balik secara langsung kepada masyarakat melainkan masyarakat akan menerimanya dalam bentuk lain yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat (Resmi, 2016).

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi finansial (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2016).

3. Jenis Pajak

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa (Resmi, 2016).

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal (Resmi, 2016)

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing – masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Resmi, 2016)

4. Tarif Pajak

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

- a. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
- c. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- d. Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang - undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

C. Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Subjek Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- 3) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. **Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri**

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *self – assessment*. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Sistem *self – assessment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, di bawah ini adalah hal – hal yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi:

a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Pilih SPT Tahunan

Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu yaitu tanggal 31 Maret.

Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada 3 macam SPT Tahunan:

- 1) Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja termasuk pensiunan dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun dan tidak terdapat penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi mengisi formulir 1770 SS.
- 2) Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya atau mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh

final. Contohnya karyawan, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya, mengisi formulir 1770S.

- 3) Bagi orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan dari satu atau lebih pemberi bekerja serta penghasilan lainnya, yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan norma penghitungan penghasilan neto. Contohnya dokter praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, dan kegiatan ekonomi lainnya, mengisi formulir 1770.

c. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak

d. Lapor SPT Tahunan dengan OnlinePajak

Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara melaporkan formulir SPT pajak, yaitu:

- 1) Manual

- a) Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak.
- b) Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.

- 2) Elektronik

Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan

oleh DJP seperti OnlinePajak. Agar dapat melakukan e-Filing, seseorang harus memiliki EFIN terlebih dahulu yang bisa didapatkan dari KPP, lalu melakukan e-filing dengan OnlinePajak seperti yang wajib pajak badan selama ini lakukan.

D. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, yang meliputi:

1. SPT Tahunan PPh WP Badan adalah SPT 1771 dan SPT 1771\$;
2. SPT Tahunan PPh WP OP Karyawan adalah:
 - a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan selain dari

usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

3. SPT Tahunan PPh WP OP Non Karyawan adalah SPT 1770 yang digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.

Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:

1. WP Badan;
2. WP OP Karyawan dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 96301, 96302, 96303, 96304, dan 96305;
3. WP OP Non Karyawan dengan KLU selain dari KLU WP OP Karyawan
 Dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk bendahara, joint operation, cabang/ lokasi, WP Penghasilan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan PPh.

SPT Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan e – SPT adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017. E – FIN adalah nomor identitas yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada WP yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Tahunan PPh yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio kepatuhan adalah keseluruhan SPT Tahunan PPh yang telah dilakukan perekaman Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) atau dalam hal disampaikan secara elektronik, telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). WP Bayar adalah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran atas:

1. PPh Pasal 25/29;
2. PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas PPh Final PP 46;
3. PPh Final Pasal 15 atas:
 - a. PPh Final Perwakilan Dagang Luar Negeri;
 - b. PPh Final Pelayaran/Penerbangan Asing;
 - c. PPh Final Pelayaran Dalam Negeri.

E. Tingkat Kepatuhan Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat

dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul, sebagaimana dinyatakan James and Alley dalam Simanjuntak (2012: 84).

Pendapat serupa dinyatakan oleh James and Nobes dalam Simanjuntak (2012: 84), Kepatuhan pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi hukum pajak. Oleh karena itu, derajat ketidakpatuhan pajak diukur dengan berapa kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100% (Simanjuntak, 2012: 85).

Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Untuk itu definisi kepatuhan lebih sesuai adalah kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*enforcement activity*) sebelumnya (Simanjuntak, 2012: 85).

2. Tingkat Kepatuhan Pajak

Menurut *Compliance Model OECD Centre for Tax Policy and Administration* dalam Simanjuntak (2012: 86) Masyarakat wajib Pajak dibagi dalam 5 (lima) tingkatan kepatuhan. Pada Tingkat kepatuhan

wajib pajak paling baik atau ideal dimana wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus – menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik. Saat ini DJP memiliki tenaga *AR (Account Representative)* yang dapat berperan aktif sesuai perannya dalam membina wajib pajak, memberikan penyuluhan, informasi yang diperlukan, sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan tingkat kesadaran yang sangat baik wajib pajak akan terus secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi bila terdapat pelayanan yang baik dari aparat perpajakan. Wajib pajak mengetahui dengan benar untuk selalu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan aturan yang benar.

Pada tingkat kepatuhan pajak dimana wajib pajak yang selalu mencoba – coba memanfaatkan peluang untuk menghindar pajak walau tidak selalu berhasil. Keputusan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan bagi yang melanggarnya terkena sanksi sesuai ketentuan.

Wajib pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan pajak dengan baik. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik wajib pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar. Dengan strategi ini diharapkan dikemudian hari wajib pajak akan membatalkan niatnya untuk menghindar pajak, sehingga kembali dapat meningkatkan kepatuhannya (Simanjuntak, 2012).

Tingkatan kepatuhan pajak dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak selalu dengan aktif menghindar memenuhi kewajibannya dengan alasan berbeda-beda. Masalah perbedaan perlakuan pajak akibat masih dirasakannya ketidakadilan aturan, prosedur administrasi pelaporan pajak yang dirasakan masih rumit mendorong wajib pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebaliknya gejala ini dapat pula diakibatkan oleh keberadaan usaha wajib pajak yang menurun, sehingga kewajiban pajak menjadi tertunda. Demikian pula perilaku curang sebagian wajib pajak dapat mendorong wajib pajak lainnya bertindak sama.

Tingkat kepatuhan pajak yang terakhir adalah sudah pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Fenomena ini

menunjukkan seolah ada dan bisa sebagian wajib pajak berada diatas undang-undang atau aturan perpajakan. Segala upaya dilakukan wajib pajak untuk menghindar pajak, bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak, yaitu dengan sengaja melanggar aturan perpajakan.

Dalam kondisi ini pajak yang seharusnya merupakan kewajiban menjelma menjadi suatu hal yang tidak penting dan dapat diabaikan begitu saja. Efektivitas penerimaan pajak menghadapi tantangan berat untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan hukum menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal (Simanjuntak, 2012)

Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak):

- a. Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai dengan kualifikasinya dalam surat edaran target rasio kepatuhan.
- b. KPP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai klasifikanya dalam surat edaran tentang target rasio kepatuhan.

3. Faktor Utama Kepatuhan Pajak

a. Teori Risiko Menentang (*risk aversion theory*)

Teori standar tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo dalam Simanjuntak (2012: 100). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Berdasarkan teori ini faktor utama kepatuhan pajak antara lain: pendapatan yang tetap, tarif pajak, probabilitas dilakukan pemeriksaan dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan.

b. Teori Moral Pajak (*tax morale theory*)

Frey dalam Simanjuntak (2012: 101) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). Menurut pendapat ini moral pajak dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi moral pajak seperti;

- 1) Persepsi adanya kejujuran
- 2) Sikap membantu atau melayani dari aparat
- 3) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
- 4) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak
- 5) Sejumlah sifat-sifat individu lainnya

4. Rasio Tingkat Kepatuhan Pajak

Definisi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-06/PJ/2017 adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2017 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2016.
- b. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non Karyawan adalah perbandingan antar jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non Karyawan yang diterima selama tahun 2017 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan Badan dan OP Non Karyawan per 31 Desember 2016.

Presentase Pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sebagai berikut:

- 1) Untuk KPP Pratama adalah selisih/penambahan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang telah melakukan pembayaran pada tahun 2017 dengan tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun 2016.
- 2) Untuk KPP Madya, KPP di bawah lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus adalah perbandingan antara jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang

melakukan pembayaran pada tahun 2017 dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non Karyawan per 31 Desember 2016.

Dalam praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada DJP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari (Simanjuntak, 2012): Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- c. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

5. Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2017 sebesar 75%, Target minimal masing – masing Kanwil DJP dan KPP ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017.

b. Target Rasio Kepatuhan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

1) Presentase tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP Non Karyawan sebesar 50%. Target minimal masing – masing Knwil DJP dan KPP ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017.

2) Presentase pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sebesar 25%. Target minimal masing – masing Knwil DJP dan KPP ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017.

c. Penentuan target sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah mempertimbangkan pencapaian target nasional, kondisi geografi, demografi, segmentasi Subjek Pajak, dan pencapaian tahun – tahun sebelumnya.

Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017.
- 2) KPP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017.

F. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Kartu NPWP

Setiap Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh kartu NPWP yang merupakan bukti identitas WP ketika berhubungan dengan pajak. Jika WP membuat dokumen perpajakan, NPWP agar dicantumkan. Dalam kartu NPWP berisi identitas WP yaitu NPWP, nama WP, alamat WP, dan tanggal terdaftar dalam administrasi DJP.

NPWP merupakan nomor unik dalam administrasi DJP yang terdiri dari 15 angka (digit) dengan struktur : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX atau 01.234.567.8-901.000. Sementara makna dari setiap angka secara berurutan dalam NPWP adalah sebagai berikut:

- Dua digit pertama yaitu 01 : Menunjukkan jenis WP yaitu Orang Pribadi atau Badan atau Bendahara.

- Tujuh digit berikut yaitu 234.567.8 : Menunjukkan nomor WP dalam administrasi DJP.
- Tiga digit berikut yaitu 091 : Menunjukkan kode KPP tempat WP terdaftar.
- Tiga digit terakhir yaitu 000 : menunjukkan kode status WP apakah pusat atau cabang, yaitu bila 000 menunjukkan status pusat/domisili, sedangkan bila 001, 002, 003, dan seterusnya menunjukkan status lokasi/cabang.

2. Manfaat Memiliki NPWP

WP yang telah memiliki NPWP akan memperoleh manfaat di antaranya :

- c. Dapat memperoleh hak-hak dalam perpajakan, seperti meminta kelebihan pembayaran pajak (restitusi), mengajukan keberatan, mengajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF), mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak, dan lainnya.
- d. Dapat mengajukan permohonan surat izin dari Instansi Pemerintah, seperti Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP), Izin Penanaman Modal, dan lainnya yang mempersyaratkan NPWP;
- e. Persyaratan pembuatan Rekening Koran di bank;
- f. Mengajukan pinjaman/kredit ke lembaga keuangan;
- g. Persyaratan mengikuti tender yang dilakukan oleh Pemerintah.
- h. Dan lainnya.